

MANAJEMEN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

(Curriculum and Learning Management)

U s m a n

usman@gmail.com

Guru Kementerian Agama Kab. Tana Toraja

Abstract, Management will not be separated from the learning activities because the management is an attempt to succeed a goal in education. There is a need for management, arrangement, and arrangement or similar activities that are still associated with educational institutions in order to develop human resources in order to meet the educational goals as optimal as possible. national education will be able to manifest development humans who can build themselves and together responsible for nation building. To be able to realize that the Indonesian government through the education office in the management of education is in the standard of education management. Curriculum management is a curriculum system oriented to productivity in which the curriculum is oriented to learners, the curriculum is created as to enable learners to achieve learning outcomes. The curriculum should reflect the good cooperation between the parties concerned, comprehensive, and systematic in order to realize the achievement of the curriculum objectives.

Keywords: Management, Curriculum, Learning

Manajemen tidak akan terlepas dari kegiatan pembelajaran karena manajemen tersebut merupakan usaha untuk mensukseskan suatu tujuan dalam pendidikan. Diperlukan adanya pengelolaan, penataan, dan pengaturan ataupun kegiatan yang sejenis yang masih berkaitan dengan lembaga pendidikan guna mengembangkan sumber daya manusia agar dapat memenuhi tujuan pendidikan seoptimal mungkin. pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Untuk mampu mewujudkan hal tersebut pemerintah Indonesia melalui dinas pendidikan dalam pengelolaan pendidikan terdapat pada standar pengelolaan pendidikan. Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem kurikulum yang berorientasi pada produktifitas dimana kurikulum tersebut berorientasi pada peserta didik, kurikulum dibuat sebagaimana dapat membuat peserta didik dapat mencapai tujuan hasil belajar. Kurikulum yang dibuat harus dapat mencerminkan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.

Kata Kunci : Manajemen, Kurikulum, Pembelajaran

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Ia merupakan cerminan falsafah hidup suatu bangsa. Kearifan mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut sekarang. Dengan demikian, ia mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Dalam konteks tersebut, Soedijarto menjelaskan bahwa kurikulum mampu membentuk karakter bangsa dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme terhadap anak bangsa sehingga mencintai bangsanya sebagaimana mencintai dirinya sendiri dan keluarganya. Di samping itu, kurikulum juga mengandung nilai religius yang berupaya mendidik anak bangsa supaya mengenal Tuhannya dan dirinya sehingga

menyuntikkan kesadaran sehingga mereka menjadi anak-anak yang bertanggungjawab.¹

Manajemen tidak akan terlepas dari kegiatan pembelajaran karena manajemen tersebut merupakan usaha untuk mensukseskan suatu tujuan dalam pendidikan. Diperlukan adanya pengelolaan, penataan, dan pengaturan ataupun kegiatan yang sejenis yang masih berkaitan dengan lembaga pendidikan guna mengembangkan sumber daya manusia agar dapat memenuhi tujuan daripada pendidikan tersebut seoptimal mungkin. Sesuai dengan salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu ikut

¹Soedijarto, *Landasan dan Arah pendidikan nasional Kita*, (Jakarta: Kompas, 2008), h 118.

mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 diamanatkan adanya kenaikan anggaran pendidikan menjadi 20 % dari APBN. Anggaran pendidikan lebih tinggi dari anggaran kesehatan, karena program ini bertujuan mewujudkan manusia yang sejahtera lahir dan batin, serta menguasai sains dan teknologi dengan tetap memprespektifkan etis dan panduan moral.

Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Untuk mampu mewujudkan hal tersebut pemerintah Indonesia melalui dinas pendidikan dalam pengelolaan pendidikan terdapat pada standar pengelolaan pendidikan. Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem kurikulum yang berorientasi pada produktifitas dimana kurikulum tersebut berorientasi pada peserta didik, kurikulum dibuat sebagaimana dapat membuat peserta didik dapat mencapai tujuan hasil belajar. Kooperatif, kurikulum yang dibuat harus dapat mencerminkan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan

ketercapaian tujuan kurikulum yaitu kurikulum yang dirancang harus selalu koherensi mulai dari silabus sampai pada pengembangan RPP. Sehingga dalam dunia pendidikan harus terdapat kurikulum yang dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. dalam makalah ini akan dibahas mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran sehingga dapat diketahui tujuan dari pembuatan kurikulum tersebut, prinsip-prinsip yang ada pada kurikulum, serta ruang lingkup pada kurikulum.

PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen Kurikulum

Secara bahasa manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang artinya mengatur. Adapun secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard bahwa: "*Management as working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals*" (manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok dengan

maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi).²

Hamalik, bahwa manajemen merupakan suatu proses sosial yang berhubungan dengan keseluruhan usaha manusia dengan manusia lain serta sumber-sumber lainnya dengan menggunakan metode yang efisien efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.³

Usaha-usaha tersebut menurut George R. Terry, berupa proses-proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Adapun istilah kurikulum, banyak para ahli memberikan pendapat. Pemahaman tentangnya adalah penting, karena akan menentukan arah pembelajaran yang terkait dengan proses maupun substansinya. Menurut Suyanto, jika kurikulum hanya di pahami dalam arti sempit, jangan diharapkan kalau pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan pendidikan yang diselenggarakan tidak akan mampu menghasilkan generasi yang pintar, tangguh, dan cerdas.⁵

Secara etimologi, istilah kurikulum (*curriculum*) berasal dari kata *curir* (pelari) dan *curere* (tempat berpacu), yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Karena

²Kenneth H. Blanchard and Hersey Paul, *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1982), hln. 3.

³Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: UPI dan Remaja Rosdakarya, 2006), h. 16.

⁴Lihat: Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 1-2.

⁵Suyanto & Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: AdiCita, 2000), h 65.

pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari *start* sampai *finish* untuk memperoleh medali/penghargaan.⁶ Secara terminology, sebagaimana dikemukakan oleh Hilda Taba, bahwa kurikulum sebagai rencana belajar (*a curriculum is a plan for learning*). Rencana tersebut biasanya berisi tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran dan evaluasi.⁷ Hal senada dikemukakan oleh Beauchamp dalam bukunya *Warsito* yang dikutip oleh Sa'dun Akbar bahwa, " *A Curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for the education of people during their enrollment in given school*". (Kurikulum adalah dokumen tertulis yang berisi bahan-bahan, tetapi pada dasarnya, ia merupakan rencana pendidikan bagi orang-orang selama mereka mengikuti pendidikan yang diberikan di sekolah).⁸ Defenisi seperti di atas sejalan dengan defenisi yang terdapat pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁹

Defenisi yang sedikit berbeda dikemukakan oleh B. Othanel Smith, W.O. Stanley, dan J. Harlan Shores bahwa kurikulum adalah "*a sequence of potential experiences is set up in the school for the purpose of disciplining children and youth in group ways of thinking and acting* (urutan pengalaman potensial yang diatur sekolah untuk tujuan mendisiplinkan anak-anak dan remaja dengan cara kelompok berpikir dan bertindak)".¹⁰ Hal senada dan lebih luas dikemukakan oleh Albert Oliver yang mengemukakan bahwa: "*Curriculum with the*

educational program and divided into four basic element: (1) the program of study, (2) the program of experiences, (3) the program of services, and (4) the hidden curriculum".¹¹ Berdasarkan pendapat Oliver tersebut dapat dipahami bahwa kurikulum pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat komponen pokok yaitu sebagai program pendidikan atau belajar, program pengalaman, program latihan, dan *hidden curriculum*.

Dengan demikian, dalam teori kurikulum sedikitnya ada dua bagian besar kurikulum, yaitu kurikulum formal yang tertulis atau *written curriculum* dan kurikulum yang tidak tertulis yang lebih dikenal dengan *hidden curriculum*. Untuk mencapai pendidikan yang baik, keduanya harus saling melengkapi dan tidak boleh terjadi ketimpangan. Menurut Sanjaya perkembangan peserta didik hanya akan tercapai apabila dia memperoleh pengalaman belajar melalui semua pelajaran yang disajikan sekolah, baik melalui kurikulum tertulis ataupun yang tidak tertulis (*hidden curriculum*).¹² Dalam konteks tersebut, Dede Rosyada berpendapat bahwa kurikulum yang dapat mengantarkan siswa sesuai harapan, idealnya tidak cukup hanya kurikulum yang dipelajari saja (*written curriculum*), tetapi juga *hidden curriculum* yang secara teoretis sangat rasional memengaruhi siswa baik menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, bahkan pada kebijakan dan manajemen pengelolaan sekolah secara lebih luas dan hubungan vertikal dan horizontal.¹³

Berdasarkan beberapa definisi manajemen dan kurikulum yang telah dipaparkan di atas, maka manajemen kurikulum menurut Suharsimi Arikunto adalah segala proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.¹⁴ Sama halnya dengan pendapat B.

⁶Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan pembelajaran, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, (Bandung: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 2.

⁷Munir, *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 28.

⁸Sa'dun Akbar dan Hadi Sriwiyana, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (IPS)*, (Yogyakarta: Cipta Media, 2010), h 2

⁹Tim Dosen AP, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), h 37.

¹⁰F. Michael Connelly dan D. Jean Clandinin, *Teacher as Curriculum Planners*, (Amsterdam Vanue: Teacher College Press, 1988), h 5

¹¹Lihat: Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 51.

¹²Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), h 9

¹³Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokras, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*(Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 32.

¹⁴Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), h 131.

Suryosubroto bahwa manajemen kurikulum adalah kegiatan yang dititikberatkan kepada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya.¹⁵ Dikemukakan pula oleh Luneberg dan Orstein bahwa ada tiga proses utama dalam manajemen kurikulum, yaitu perencanaan kurikulum (*planning the curriculum*), pelaksanaan kurikulum (*implementation the curriculum*), dan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum (*evaluating the curriculum*).¹⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diawali dari tahap perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi program, agar kegiatan dapat terarah serta dapat berdaya hasil guna dan berdaya guna.

Tujuan Manajemen Pembelajaran

Tujuan manajemen berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan dapat menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia ialah Pancasila, maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah membentuk masyarakat yang Pancasila. Meskipun pada saat ini kurikulum yang dianut adalah KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan sehingga kurikulum dikembangkan oleh tingkat satuan masing-masing atau tingkat sekolah masing-masing, sehingga kurikulum tersebut sesuai dengan pengembangan masyarakat disekitar sekolah. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Tujuan pendidikan mempunyai klasifikasi, dari tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang sangat khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi seperti dibawah ini

a. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan Pendidikan Nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan, artinya setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia sesuai rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggara oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non formal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dari filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Tujuan Pendidikan Nasional merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas Tujuan Pendidikan Nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003, pasal 3, bahwa pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab.

b. Tujuan Instusional

Tujuan Instusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh pendidikan di suatu lembaga tertentu. Tujuan Instusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan oleh jenjang pendidikan seperti misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi.

c. Tujuan Kurikuler

Tujuan Kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Oleh sebab itu tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian setiap tujuan kurikuler harus mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan instusional. Dalam kurikulum

¹⁵B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta:Rineka Cipta,2004),h 42.

¹⁶Tim Dosen AP, *Manajemen Pendidikan*, h. 41.

yang berpotensi pada pencapaian kompetensi, tujuan kurikuler menggambarkan standar isi setiap mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan instruksional atau sekarang lebih populer dengan tujuan pembelajaran, merupakan tujuan yang paling khusus.

d. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam sekali pertemuan. Karena hanya guru yang memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, maka menjabarkan tujuan pembelajaran ini adalah tugas guru. Sebelum guru melakukan proses belajar mengajar (PBM), guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik setelah mereka selesai mengikuti pelajaran. Menurut Bloom, dalam bukunya *Taxonomy of Educational Objectives* yang terbit tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam tiga klasifikasi atau tiga domain (bagian), yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor.

Tujuan manajemen berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Dalam skala makro rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau system nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan dapat menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia ialah Pancasila, maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah membentuk masyarakat yang Pancasila. meskipun pada saat ini kurikulum yang dianut adalah KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan sehingga kurikulum dikembangkan oleh tingkat satuan masing masing atau tingkat sekolah masing masing, sehingga kurikulum tersebut sesuai dengan pengembangan masyarakat disekitar sekolah, Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Manajemen kurikulum dan pembelajaran bertujuan untuk 1)

Pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. 2) Mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. 3) Pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. 4) Meningkatkan kualitas belajar mengajar pada satuan pendidikan tertentu.

Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum

1. Prinsip Manajemen Kurikulum

Secara gramatikal prinsip berarti asas, dasar, keyakinan dan pendirian. Dari pengertian diatas tersirat makna bahwa kata prinsip itu menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sikap mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada dan terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Dari pengertian diatas prinsip mencerminkan tentang hakikat yang dikandung oleh sesuatu, mungkin produk atau proses, dan bersifat memberikan aturan main yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Pengertian prinsip diatas dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan prinsip dan fungsi dari manajemen kurikulum. Prinsip – prinsip manajemen kurikulum menunjuk pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan manajemen kurikulum yang pada dasarnya prinsip – prinsip tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Merujuk pada prinsip – prinsip manajemen kurikulum yang dikemukakan oleh Rusman, ada lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengelolaan kurikulum, yaitu :1) *Produktivitas*, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. 2) *Demokratisasi*, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subyek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum. 3) *Kooperatif*, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama positif dari berbagai pihak terlibat. 4)

Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat. 5) *Mengarahkan visi, misi dan tujuan*, yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum.¹⁷

2. Fungsi Manajemen Kurikulum

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif dan efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Oleh karena itu, selain peranan dari manajemen kurikulum ada pula beberapa fungsi dalam manajemen kurikulum yang dijadikan landasan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Beberapa fungsi kurikulum tersebut dikemukakan Rusman sebagai berikut. 1) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. 2) Meningkatkan keadilan (*equality*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler. Meningkatkan relevansi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 3) Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional efektif, dan terpadu, dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan

pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.¹⁸

Dengan demikian, berdasarkan definisi manajemen maka secara garis besar ada beberapa kegiatan berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen kurikulum, yaitu: 1) Mengelola perencanaan kurikulum 2) Mengelola implementasi kurikulum 3) Mengelola pelaksanaan evaluasi kurikulum.

Implementasi Kurikulum Nasional Indonesia

Dalam perjalanannya, dunia pendidikan Indonesia telah menerapkan enam kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan terakhir kurikulum 2013. Dalam konteks perubahan tersebut, ada rumor yang berkembang dalam masyarakat bahwa ada kesan "Ganti Menteri Pendidikan Ganti Kurikulum". Kesan tersebut bisa benar dan bisa tidak, tergantung dari sudut mana mata memandang. Kalau sudut pandangnya politis maka perubahan kurikulum tersebut akan selalu dikaitkan dengan kekuasaan (siapa yang berkuasa). Namun, kalau sudut pandangnya nonpolitik, maka perubahan tersebut barangkali merupakan suatu keniscayaan dalam rangka merespon perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Pendidikan harus mampu menyelesaikan dinamika perkembangan tersebut, apalagi ia berkaitan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dan hal tersebut hanya bisa dijawab dengan perubahan kurikulum.

¹⁷Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2009 h. 36

¹⁸Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, h. 93.

Menurut Indra Djati Sidi, bahwa pembaruan kurikulum merupakan suatu keniscayaan. Pengembangannya haruslah didasarkan kepada beberapa indikator; *pertama*, kurikulum harus bersifat luwes, sederhana, dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan datang karena berbagai perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. *Kedua*, kurikulum harus bersifat pedoman pokok (general guideline) kegiatan pembelajaran siswa. Kurikulum tidak terlalu rinci dan dapat dikembangkan secara mandiri dan kreatif oleh para guru sesuai dengan potensi peserta didik setempat, keadaan sumber daya penduduk, dan kondisi daerah setempat. *Ketiga*, pengembangan kurikulum selayaknya secara simultan dengan pengembangan bahan ajar dan media atau alat pembelajaran.¹⁹

Keempat, kurikulum pendidikan hendaknya berpatokan pada standar global atau regional, berwawasan nasional, dan dilaksanakan secara lokal. Dengan demikian, kualitas kurikulum pendidikan setara dengan negara-negara lain yang mempunyai wawasan keunggulan, namun dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang berbeda. *Kelima*, kurikulum pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan dan kesinambungan dengan satuan jenjang pendidikan di atasnya. *Keenam*, pengembangan kurikulum bukan lagi menjadi otoritas pemerintah pusat, tetapi merupakan *shared activity* dengan pemerintah daerah, bahkan komunitas. *Ketujuh*, pengembangan tidak diarahkan untuk menciptakan satu kurikulum tunggal yang diberlakukan untuk semua sekolah. *Kedelapan*, kurikulum juga mesti memperhatikan pendidikan yang terjadi di keluarga dan komunitas. Sekolah, keluarga, dan komunitas ketiganya menjadi pilar pendidikan kegiatan pendidikan merupakan *share activity* dari ketiga pilar pendidikan tersebut.

Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas perubahan-perubahan kurikulum pendidikan nasional:

1. Kurikulum 1968

¹⁹Sidi, Indra Jati. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 2000).

Sebelum diterapkan kurikulum 1968, pada tahun 1947 pernah diterapkan Rencana pelajaran yang pada waktu itu menteri dijabat oleh Mr. Suwandi. Rencana Pelajaran 1947 memuat ketentuan sebagai berikut: (1) bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah, (2) jumlah mata pelajaran untuk Sekolah Rakyat (SR) 16 bidang studi, SMP 17 bidang studi, dan SMA jurusan B 19 bidang studi. Lahirnya Rencana Pelajaran 1947 diawali dari pembenahan sistem sekolah pasca Indonesia merdeka yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Tujuan pendidikan menurut kurikulum 1969 adalah mempertinggi mental-moral pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan, serta mengembangkan fisik yang kuat dan kesehatan. Ketentuan-ketentuan dalam kurikulum 1968 adalah: (1) bersifat: *correlated Subject curriculum*, (2) jumlah mata pelajaran untuk SD 10 bidang studi, SMP 18 bidang studi, SMA jurusan A 18 bidang studi, SMA jurusan B 20 bidang studi, jurusan SMA C 19 bidang studi, (3) penjurusan SMA dilakukan di kelas II.

2. Kurikulum 1975

Kurikulum ini ditetapkan ketika menteri dijabat oleh Letjen TNI Dr. Syarif Thajeb (1973-1978). Ketentuan-ketentuan kurikulum 1975 adalah: (1) sifat: *integrated curriculum organization*, (2) SD mempunyai satu struktur program terdiri atas 9 bidang studi, (3) pelajaran Ilmu Alam dan Ilmu Hayat menjadi ilmu pengetahuan alam (IPA), (4) pelajaran ilmu Aljabar dan Ilmu Ukur menjadi Matematika, (5) jumlah mata pelajaran SMP dan SMA menjadi 11 bidang studi, (6) penjurusan SMA dibagi tiga : IPA, IPS, dan Bahasa.

3. Kurikulum 1984

Kurikulum ini diterapkan ketika menteri pendidikan dijabat oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto seorang ahli sejarah Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam kurikulum 1984 adalah: (1) sifat: *Content Based Curriculum*, (2) program pelajaran mencakup 11 bidang studi, (3) jumlah mata pelajaran SMP 12 bidang studi, (4) jumlah mata pelajaran SMA 15 bidang studi untuk program Inti, 4 bidang studi untuk program pilihan, (5) penjurusan SMA dibagi lima: program A1 (ilmu fisika), A2 (ilmu biologi), A3 (ilmu sosial), A4 ilmu budaya, dan A5 (ilmu agama), (6) penjurusan dilakukan di kelas II.

Pada kurikulum 1984 ada penambahan bidang studi, yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Hal ini bisa dimaklumi karena menteri pendidikan saat itu dijabat oleh seorang sejarawan. Dalam perjalanannya, kurikulum 1984 dianggap oleh banyak kalangan dianggap sarat beban sehingga diganti dengan kurikulum 1994 yang lebih sederhana.

4. Kurikulum 1994

Kurikulum ini ditetapkan ketika menteri pendidikan dijabat oleh Prof. Dr. Ing Wardiman Djonegoro seorang teknokrat yang menimba ilmu di Jerman Barat bersama BJ. Habibie. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam kurikulum 1994 adalah: (1) bersifat *Objectif Based Curriculum*, (2) nama SMP menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SMA diganti SMU (Sekolah Menengah Umum), (3) mata pelajaran PSPB dihapus, (4) program pengajaran SD dan SLTP disusun dalam 23 mata pelajaran, (5) program pengajaran SMU disusun dalam 10 mata pelajaran, (6) penjurusan SMA dilakukan di kelas II terdiri dari program IPA, IPS, dan bahasa.

Ketika reformasi bergulir tahun 1998, kurikulum 1994 mengalami penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mengkomodasi tuntutan reformasi. Oleh karena itu, muncul suplemen kurikulum 1994 yang lahir tahun 1999. Dalam suplemen tersebut ada penyesuaian-penyesuaian materi pelajaran, terutama pada pelajaran sosial, seperti PPKN, Sejarah, dan beberapa mata pelajaran yang lainnya. Lagi-lagi, kurikulum ini pun mengalami nasib yang sama dengan kurikulum sebelumnya bersamaan dengan lahirnya undang-undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan nasional menggagas kurikulum baru yang diberi nama kurikulum berbasis kompetensi.

5. Kurikulum Berbasis Kompetensi (kurikulum 2004)

Kurikulum Berbasis Kompetensi lahir ditengah-tengah adanya tuntutan mutu pendidikan di Indonesia. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa mutu pendidikan Indonesia semakin hari semakin terpuruk. Bahkan dengan negara tetangga pun yang dulu belajar di Indonesia seperti Malaysia, Indonesia tertinggal dalam hal mutu pendidikan. Pendidikan di

Indonesia dianggap hanya melahirkan lulusan yang akan menjadi beban negara dan masyarakat karena kurang ditunjang dengan kompetensi yang memadai ketika terjun dalam masyarakat.

Kurikulum Berbasis Kompetensi digagas ketika menteri pendidikan dijabat oleh Prof. Dr. Abdul Malik Fajar, M.Sc. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah: (1) bersifat *Competency Based Curriculum*, (2) penyebutan SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA, (3) program pelajaran SD disusun dalam mata pelajaran, (4) program pengajaran SMP disusun dalam 11 mata pelajaran, (5) program SMA disusun dalam 17 mata pelajaran, (6) penjurusan SMA dilakukan di kelas II, terdiri atas Ilmu Alam, Sosial, Bahasa.

Kurikulum berbasis kompetensi meskipun sudah diujicobakan di beberapa sekolah melalui *pilot project*, tetapi pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional belum mengesahkan kurikulum ini secara formal. Sepertinya pemerintah masih ragu-ragu dengan kurikulum ini, hal ini dimaklumi, karena uji coba kurikulum ini menuai kritikan dari berbagai kalangan, baik para ahli pendidikan maupun praktisi pendidikan. Beberapa kritikan terhadap kurikulum ini adalah: (1) masih sarat dengan materi sehingga ketakutan guru akan dikejar-kejar materi seperti yang terjadi pada kurikulum 1994 akan terulang kembali, (2) pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional masih terlalu intervensi terhadap kewenangan sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum tersebut, (3) masih belum jelasnya (bias) kompetensi sehingga ketika diterapkan pada standar kompetensi kelulusan belum terlalu aplikatif, (4) adanya sistem penilaian yang belum jelas terstruktur.

6. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) merupakan revisi dan pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KTSP lahir karena KBK dianggap masih sarat dengan beban belajar dan pemerintah pusat dalam hal ini Diknas masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru, dan komite sekolah) diberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulum,

seperti membuat indikator, silabus, dan beberapa komponen kurikulum lainnya.

Implementasi kurikulum KTSP adalah dalam rangka upaya merekonstruksi kembali peran sekolah dalam pengembangan kurikulum. Kurikulumnya didisain untuk menghindari budaya hegenomi. Demikian halnya, pengetahuan yang diberikan tidak hanya "ditransferkan", tetapi "ditransformasikan". KTSP memberikan kesempatan bagi guru untuk mengembangkan kemampuan **transformatif**, yakni mengembangkan materi sesuai dengan kemampuan dan potensi siswa agar nantinya dengan bekal pengetahuan dasar dan kemampuan menjadi individu yang aktif dan kreatif.²⁰

7. Kurikulum 2013

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal tersebut adalah dalam rangka untuk merespon berbagai tantangan internal dan eksternal. *Pertama*, tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Pengelolaan, Standar Biaya, Standar Sarana Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Kompetensi Lulusan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. *Kedua*, seperti; (1) tantangan masa depan, (2) kompetensi masa depan, (3) persepsi masyarakat, (4) perkembangan pengetahuan dan pedagogi, dan (5) fenomena negatif yang mengemuka.

Perubahan-perubahan kurikulum nasional yang terjadi ternyata dalam prakteknya tidaklah mudah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dwiningrum misalnya, tentang pelaksanaan kurikulum KTSP menggambarkan bahwa KTSP yang dikembangkan oleh guru masih "ganti baju", yakni tetap KBK yang juga

belum dipahami oleh guru secara keseluruhan. Karena, tidak semua guru mempunyai kemampuan yang sama untuk dapat mengembangkan kurikulum secara mandiri sesuai dengan ketentuan kurikulum dan sesuai dengan kondisi sekolah.

PENUTUP

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Ia dapat (paling tidak sedikit) meramalkan hasil pendidikan/pengajaran yang diharapkan karena ia menunjukkan apa yang harus dipelajari dan kegiatan apa yang harus dialami oleh peserta didik. Oleh karena itu, ia harus dimenej atau dikelola dengan baik dengan menerapkan ilmu manajemen modern. Tanpa hal itu, maka tujuan pendidikan yang diinginkan tidak akan tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Soedijarto, *Landasan dan Arah pendidikan nasional Kita*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Kenneth H. Blanchard and Hersey Paul, *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resouces*, New Jersey: Prentice-Hall, 1982.
- Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: UPI dan Remaja Rosdakarya, 2006.
- Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Suyanto & Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: AdiCita, 2000.
- Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan pembelajaran, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, Bandung: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Munir, *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sa'dun Akbar dan Hadi Sriwijana, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran (IPS)*, Yogyakarta: Cipta Media, 2010.
- Tim Dosen AP, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- F. Michael Connelly dan D. Jean Clandinin, *Teacher as Curriculum Planners*, Amsterdam Vanue: Teacher College Press, 1988

²⁰Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 123.

- Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran* Jakarta: Kencana Prenada, 2008.
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokras, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009)
- B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2009
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*.
- Sidi, Indra Jati. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 2000.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.